

**PENGARUH SIFAT *MACHIAVELLIAN* DAN *RELIGIUSITAS*
TERHADAP NIAT MELAKUKAN *WHISTLEBLOWING***
(Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Sijunjung)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang



Oleh :

Gisca Inayah Yudira
2017/17043069

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH *MACHIAVELLIAN* DAN *RELIGIUSITAS* TERHADAP NIAT
MELAKUKAN *WHISTLEBLOWING***

(Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Sijunjung)

Nama : Gisca Inayah Yudira
TM/ NIM : 2017/17043069
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

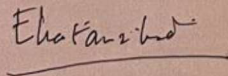
Padang, Agustus 2024

Disetujui oleh :

Mengetahui,

Kepala Departemen Akuntansi

Pembimbing



Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak

NIP. 197105222000032001



Herlina Helmy, SE, M.SA, Ak

NIP. 198003272005012002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

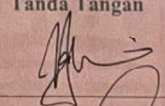

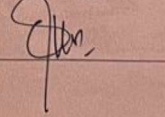
*Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH MACHIAVELLIAN DAN RELIGIUSITAS TERHADAP NIAT
MELAKUKAN WHISTLEBLOWING**

(Studi Empiris pada SKPD Di Kabupaten Sijunjung)

Nama : Gisca Inayah Yudira
TM/ NIM : 2017/17043069
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Agustus 2024

No	Jabatan	Tim Penguji Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Herlina Helmy, SE, M.SA,Ak	
2	Anggota	: Dr.Deviani, SE, Ak, M.Si	
3	Anggota	: Dewi Pebriyani, SE, M.Si	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gisca Inayah Yudira
NIM/Tahun Masuk : 17043069/2017
Tempat/Tgl Lahir : Solok / 05 Agustus 1999
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Asrama Polri Lolong, PA II No.5, Kelurahan Flamboyan Baru,
Kecamatan Padang Barat, Kota Padang
No. Hp : 082183141411
Judul Skripsi : Pengaruh Machiavellian dan Religiusitas terhadap Niat Melakukan
Whistleblowing (Studi empiris pada SKPD di Kabupaten Sijunjung)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/ skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di UNP atau di Perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani Asli oleh pembimbing, Tim penguji dan Ketua Departemen.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Agustus 2024

Yang menyatakan,



Gisca Inayah Yudira
NIM. 17043069

ABSTRAK

Gisca Inayah Yudira. (17043069/2017). Pengaruh *Machiavellian* dan *Religiusitas* terhadap Niat Melakukan *Whistleblowing* (Studi empiris pada SKPD di Kabupaten Sijunjung)

Pembimbing: Herlina Helmy, SE, M.SA,Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *machiavellian* dan *religiusitas* terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Penelitian ini dilakukan pada SKPD di Kabupaten Sijunjung, dengan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan data primer dengan jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 201 orang dari 25 SKPD di Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi berganda pada SPSS. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap niat melakukan *whistleblowing* dan *religiusitas* berpengaruh positif terhadap niat melakukan *whistleblowing*

Kata Kunci: *Machiavellian*; Niat *Whistleblowing*; *Religiusitas*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya, yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan serta kesabaran sehingga, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam penulis kirimkan untuk Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa nikmat dan cahaya Islam menerangi dunia yang penuh kejahiliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Secara khusus peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah berjasa dan membantu selama penyusunan skripsi ini dan memberikan peneliti dukungan baik yang bersifat moral maupun material.

1. Kepada ayah, ibu dan kakak tercinta, terima kasih untuk untaian doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Terima kasih selalu menjadi rumah sebagai tempat pulang paling nyaman.

2. Kepada Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd.,Ph.D selaku rektor Universitas Negeri Padang. Terima kasih untuk segala fasilitas dan kemudahan selama berada dibangku perkuliahan.
3. Kepada Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Terima kasih untuk kenyamanan fakultas terbaik yang pernah ada.
4. Kepada Ibu Dr. Eka Fauzihardani, SE., M.Si.Ak selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Negeri Padang sekaligus dosen terbaik saat mengajar penulis selama bangku perkuliahan.
5. Kepada Ibu Herlina Helmy, SE, Ak., M.S.Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi peneliti. Terima kasih atas motivasi, bimbingan dan arahnya Ibu.
6. Kepada Ibu Dr. Deviani, SE,M.Si, Ak dan Ibu Dewi Pebriyani, SE, M.Si selaku Dosen penguji peneliti. Terima kasih atas bimbingan dan arahnya yang telah ibu-ibu berikan.
7. Kepada Ibu Sany Dwita, SE, M.Si. Ak, CA, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus orang tua peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri padang. Terima kasih atas arahnya Ibu.

8. Teruntuk Arif Rahman Effendi, S.Pd terimakasih telah menjadi tempat ternyaman penulis dalam melimpahkan semua keluh kesah dalam pembuatan skripsi ini.
9. Untuk SAHABAT semenjak dini. Terima kasih sudah menjadi tempat bercerita, berbagi segala tawa dan duka. Terima kasih atas doa dan dukungannya.
10. Untuk kawan-kawan Akuntansi Angkatan 2017. Terima kasih untuk segala keseruan dan kisahnya. Perpisahan selalu ada, semoga waktu mengizinkan kita kembali berjumpa dan sukses selalu buat kita.
11. Terima kasih untuk dosen-dosen dan admin jurusan akuntansi yang telah membantu memudahkan penyelesaian penelitian ini serta terima kasih untuk seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga hal-hal baik selalu menyertai orang-orang yang menyebarkannya. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, HIPOTESIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL.....	15
A. <i>Theory of Planned Behaviour</i> (TPB)	15
B. <i>Whistleblowing</i>	16
C. <i>Machiavellian</i>	19
D. <i>Religiusitas</i>	21
E. Penelitian Terdahulu	22
F. Hipotesis.....	24
G. Kerangka Konseptual	28
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data.....	29
C. Populasi dan Sampel	30
D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	32
E. Instrumen Penelitian.....	35
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	36
F. Prosedur Penelitian.....	36

G. Uji Instrumen	37
Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Machiavellian	38
Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Religiusitas	38
Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Niat Whistleblowing.....	39
Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Data.....	39
H. Uji Asumsi Klasik.....	39
I. Analisis Regresi Berganda.....	40
J. Pengujian Hipotesis.....	41
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
B. Demografi Responden.....	44
C. Analisis Statistik Deskriptif	45
D. Uji Instrumen	46
E. Uji Asumsi Klasik.....	49
F. Uji Statistik	52
G. Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Keterbatasan.....	62
C. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Jumlah PNS OPD Kabupaten Sijunjung.....	30
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	36
Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas <i>Machiavellian</i>	38
Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas <i>Religiusitas</i>	38
Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Niat <i>Whistleblowing</i>	39
Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Data.....	39
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	43
Tabel 4.2 Demografi Responden.....	44
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif.....	45
Tabel 4.4 Uji Validitas.....	47
Tabel 4.5 Tabel Reliabilitas.....	48
Tabel 4.6 Uji Normalitas.....	49
Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas.....	50
Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas.....	51
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi.....	53
Tabel 4.10 Uji Regresi Berganda.....	54
Tabel 4.11 Uji Hipotesis.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual.....	28
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah *whistleblowing* bukanlah sesuatu yang baru dan umum terjadi di banyak negara termasuk di Indonesia. Topik ini telah menjadi bidang penelitian yang banyak dipelajari dalam beberapa tahun terakhir, karena memiliki dampak positif bagi organisasi. *Whistleblowing* adalah pengungkapan yang dilakukan seseorang dalam menyampaikan informasi dugaan tindakan kecurangan yang tidak diketahui oleh publik. Menurut Yuswono & Hartijasti (2018) *whistleblowing* merupakan tindakan pengungkapan aktivitas tidak etis, perbuatan salah atau pelanggaran yang dijalankan anggota organisasi kepada pihak yang dianggap tepat mencegah terjadinya aktivitas ilegal tersebut. *Whistleblowing* sangat penting dalam mengenali dan memberantas kecurangan yang terjadi karena setiap organisasi tidak lepas dari yang namanya pelanggaran (Putri, 2015) serta sebagai sarana untuk melindungi kepentingan publik.

Tindakan *whistleblowing* terjadi karena adanya niat dari seorang individu untuk melaporkan kecurangan. Keinginan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dikenal sebagai niat, sehingga niat menjadi faktor penentu apakah seseorang akan melaporkan atau membiarkan kecurangan yang terjadi. Menurut Semendawai et al., (2011) seseorang memiliki bermacam-macam motif dalam melaporkan

kecurangan, mulai dari faktor pribadi, faktor lingkungan sekitar, bahkan sebagai bentuk itikad baik dalam menyelamatkan organisasinya.

Whistleblowing merupakan dilema etika yang kompleks, karena secara teoritis pelaksanaannya sangat layak untuk dilakukan tetapi secara praktis sangat menantang (Mansor et al., 2022) Komponen penting dari *whistleblowing* ini adalah adanya whistleblower. Hal ini memberikan peluang awal karena whistleblower dianggap paling mahir dalam mengantisipasi segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda-tanda kecurangan, sehingga hal ini memberi kesempatan lebih awal untuk mengamankan aset, reputasi dan risiko kerugian yang akan timbul. Whistleblower dituntut untuk loyal terhadap organisasi, akan tetapi dengan adanya whistleblower maka pihak tersebut dapat merusak nama organisasinya (Bagustianto & Nurkholis, 2015). Karena jika seorang whistleblower membocorkan tindakan kecurangan yang terjadi keluar organisasi, maka organisasi tersebut akan dipandang buruk dan mendapatkan respon negatif dari masyarakat atau pihak-pihak lain.

Dilema yang dihadapi para whistleblower ialah konflik antara nilai-nilai pribadi serta organisasi dan konflik antara kewajiban berhutang kepada organisasi atau pada pihak di luarnya. Menurut Suryono & Chariri (2016) whistleblower memiliki tingkat resiko yang tinggi terhadap diri sendiri, keluarga maupun organisasi, diantaranya membahayakan karir pekerjaan, mendapatkan ancaman, serta dijauhi oleh rekan kerja. Whistleblower dapat dianggap sebagai pahlawan yang bersedia

membantu pengorbanan dalam mengungkapkan kesalahan, tetapi juga dapat dianggap sebagai pengkhianat dengan niat jahat.

Dalam penelitian yang dilakukan Siallagan et al., (2017) mengatakan bahwasanya isu *whistleblowing* di Indonesia masih belum mendapat perhatian khusus, dengan dibuktikan masih maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Beberapa peristiwa yang melandasi pentingnya penelitian ini ialah pada tahun 2022 Corruption Perception Index (CPI) Indonesia mengalami penurunan skor dari tahun sebelumnya dengan menempati peringkat 110 dari 180 negara. Penurunan ini merupakan yang paling drastis sepanjang era reformasi, sehingga menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia (Transparancy International, 2022).

Hal ini juga didukung dengan adanya laporan hasil Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menemukan adanya kenaikan kasus korupsi dari tahun sebelumnya menjadi 252 kasus dengan 612 para pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka memiliki latar belakang profesi dan bentuk korupsi yang berbeda. Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pihak yang paling terlibat dalam skandal korupsi dengan total 167 atau sekitar 38%. Tingginya perilaku korupsi pada birokrasi pemerintah tentunya akan berdampak pada proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya menjadi kepercayaan masyarakat dalam mewujudkan pemerintah yang bersih, bukan menjadi pelaku

tindak kecurangan (Anandya et al., 2021). Sehingga dibutuhkan peran whistleblower dalam memberantas korupsi.

Hal ini dibuktikan dengan telah banyaknya kasus fraud dan korupsi yang berhasil ditemukan berkat adanya keberadaan whistleblower. Kasus yang akhirnya terbongkar ialah penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan, kasus ini terjadi karena adanya pencucian uang dan korupsi yang dilakukan oleh Gayus yang dimana Susno Duadji berperan sebagai whistleblower (tribunnews, 2011).

Kasus *whistleblowing* lainnya juga terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Sijunjung. Pada tahun 2022, Kejari Sijunjung menyikapi laporan pengaduan masyarakat Nagari Silokek terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Wali Nagari beserta perangkat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) dari tahun 2018 sampai 2021 dengan total kerugian (jurnalsumbar.com, 2022). Kasus korupsi lainnya melibatkan Kepala UPTD alat berat Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung periode 2020-2021. Pelaku US menyalahgunakan jabatan untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dengan tidak menyetorkan uang penyewaan alat berat kepada kas daerah di tahun 2020 dan tahun 2021, dengan total kerugian Rp 331 juta (Padangexpo.com 2023).

Sifat pelaporan yang sensitif membuat studi di bidang ini tidak dapat memahami sepenuhnya apa yang melatarbelakangi tindakan *whistleblowing*. Pemahaman mekanisme menjadi sulit karena kompleksitas variabel dan interaksi

antar variabel tersebut (Sims & Keenan, 1998). Taylor & Curtis (2013) mengatakan penelitian *whistleblowing* lebih lanjut juga harus melihat bagaimana karakter pribadi dapat mempengaruhi respon organisasi terhadap pelaporan pelanggaran. Penelitian juga dilakukan oleh Nayir & Herzig (2012) menemukan bahwa selain perbedaan budaya, perbedaan etika juga mempengaruhi pengambilan keputusan untuk pelaporan pelanggaran. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya mempelajari *whistleblowing* dari pandangan individu bukan dari pandangan nasional.

Penelitian ini berfokus dalam mengkaji faktor individu dalam mempengaruhi tindakan melakukan *whistleblowing* karena setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan kepribadian yang berbeda, yang berkontribusi pada bagaimana mereka merespon situasi tertentu. Faktor individu sering kali berhubungan dengan Keputusan moral dan etis. Dalam banyak kasus, pengalaman pribadi dan psikologis individu sangat mempengaruhi Keputusan mereka untuk melaporkan kecurangan yang diketahui. Salah satu faktor individu ialah *machiavellian* dan *religiusitas*. Dimana dua variabel ini mewakili dua kutub yang berbeda, satu bersifat pragmatis dan manipulatif sementara yang lain menekankan moralitas dan etika. Kontradiksi ini menawarkan peluang untuk memahami bagaimana dua sifat yang berlawanan dalam konteks pengambilan Keputusan etis.

Perilaku dan tindakan yang dilakukan seseorang didasari oleh niat berperilaku dan perilaku aktual yang dijelaskan dalam Theory of Planned Behaviour. Niat

seseorang akan mempengaruhi perilaku yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ketika niat untuk melakukan sesuatu sudah kuat, maka kemungkinan niat itu akan diwujudkan dalam bentuk tindakan. Theory Of Planned Behaviour digunakan dalam penelitian dilakukan untuk melihat perilaku individu saat tidak memiliki kontrol penuh atas keinginan sendiri. Niat individu merupakan prediktor utama dari perilaku yang berhubungan dengan kecurangan yang bergantung pada faktor individu seseorang. Implikasi dari teori ini dapat membawa dampak dari niat individu untuk berbuat perilaku positif atau negatif terhadap perilaku yang akan dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dalton & Radtke (2013) *machiavellian* yang dimiliki seseorang membuat pribadi tersebut bertindak dengan cara memperhitungkan keuntungan yang didapatnya. Hal ini merupakan faktor yang akan menyebabkan seseorang tidak ingin melakukan *whistleblowing*. Karena, seseorang yang berperilaku tidak etis akan mengabaikan hal-hal negatif yang terjadi disekitarnya. Riandi (2017) mengatakan bahwa orang dengan sifat *machiavellian* akan bersikap lebih rasional, tidak terbawa perasaan (non-emosi) dan akan rela berbohong agar tercapainya tujuan yang ingin dididapkannya. Seseorang dengan sifat *machiavellian* akan lebih tertarik kepada sistem yang memberikan imbalan terhadap pelaporan yang dilakukan dan cenderung tidak akan melaporkan ketika tidak adanya imbalan dari pelaporan yang dilakukan sehingga

individu tersebut mengabaikan norma etika yang ada saat dihadapkan dengan masalah-masalah moral.

Machiavellian dapat mempengaruhi *whistleblowing* pada instansi, hal ini disebabkan karena seseorang memberikan informasi kepada instansi tentang cara terbaik untuk mempengaruhi atau mendorong individu tertentu mengungkapkan kecurangan yang tersembunyi (Murphy, 2012). Penelitian terdahulu mengenai *machiavellian* terhadap Tindakan seseorang dalam melakukan dilakukan dalam penelitian Dalton & Radtke (2013) menyatakan bahwa adanya hubungan negatif dari *machiavellian* terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Hubungan negatif disebabkan oleh lemahnya lingkungan etika organisasi karena ketika lingkungan organisasi etika kuat maka hubungan negatif antara *machiavellian* dengan niat kurang menonjol. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rodiyah (2015) dan Pratiwi dan Dwita (2020). Selain itu Junitasari dan Ariyanto (2018) menyatakan bahwa *Machiavellian* berpengaruh positif terhadap niat melakukan.

Individu yang memiliki sifat *machiavellian* akan memikirkan keuntungan dan efek buruk dari kecurangan tersebut. Sartika dan Mulyani (2020) dan (Ishak, 2020) Permana (2020), membuktikan hasil berbeda dimana tidak mempengaruhi niat seseorang dalam melaksanakan. Menyatakan bahwa jika sifat individu tinggi maka akan mengakibatkan individu berperilaku lebih emosional, karena tidak mudah mengambil tindakan untuk melaporkan pelanggaran atau kecurangan.

Selain itu *religiusitas* juga mempengaruhi individu dalam melakukan pelaporan kecurangan. Kesatuan sistem kepercayaan, gaya hidup, aktivitas religi dan naluri yang mengutamakan eksistensi manusia dan mengantarkan manusia pada nilai-nilai sacral atau nilai-nilai tertinggi disebut dengan *religiusitas* (Glok dan Stark, 1969). *Religiusitas* merupakan pengamalan dan pengalaman pribadi atas keyakinan atau ajaran yang dipegang serta keterkaitan individu dengan agama yang dianutnya. Menurut Burks dan Sellani (2005) niat seseorang dapat dipengaruhi oleh *religiusitas*. Hal ini dikarenakan *religiusitas* kemungkinan berkaitan dengan peningkatan moral seseorang. Nilai *religiusitas* membantu seseorang untuk bertindak sesuai moral, dengan ajaran agama sudah menjelaskan bagaimana mengikuti etika yang baik (Satrya et al., 2019). *Religiusitas* berdampak pada arah langkah yang akan ditempuh seseorang, dimana orang yang memiliki *religiusitas* yang besar maka individu akan menghindari perilaku negatif yang dapat merusak moralnya. Jadi bisa dikatakan bahwa agama mengambil peran penting dalam memutuskan apakah seseorang akan berlaku etis atau tidak.

Religiusitas menjadi faktor yang sering mempengaruhi perilaku individu, kebiasaan dan nilai saat memilih pendekatan dan pengambilan keputusan. Sebelumnya penelitian oleh Satrya et al. (2019), Nopeanti et al. (2020) dan Karlina et al (2021) *religiusitas* diuji sebagai variabel moderasi. Sedangkan Puni et al. (2016) memberi hasil bahwa *religiusitas* pada karyawan perusahaan keuangan mikro di Ghana mempengaruhi pelaporan pelanggaran, penelitian Gokce

(2015) dan Fitri et al (2019) juga memberikan hasil yang sejalan. Ada perbedaan hasil yang dilakukan oleh Putri (2015) dan Yudha (2018) dimana *religiusitas* tidak memiliki pengaruh terhadap niat individu dalam melaporkan kesalahan.

Keberagaman penelitian sebelumnya dimana hasil menunjukkan sesuatu yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya menimbulkan keinginan peneliti untuk dapat menguji kembali variabel sifat *machiavellian* dan *religiusitas* terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Kombinasi antara sifat *machiavellian* dan *religiusitas* menciptakan satu dinamika yang menarik. Sehingga dapat mengeksplorasi bagaimana individu dapat beroperasi dalam dua medan moral yang berbeda, serta konflik internal yang mungkin muncul saat mereka harus memilih antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab moral. Menurut Suzila (2018) pelaporan whistleblower masih didominasi oleh sektor swasta, sementara pada sektor pemerintahan hanya lembaga pengawas atau lembaga negara yang menerima laporan dugaan praktik menyimpang dari pemerintah.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penelitian terkait dengan niat melakukan *whistleblowing* dalam sektor pemerintahan terkhusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih sedikit, meski hal tersebut masih tergolong dalam lingkup kecil tetapi apabila diabaikan dapat menimbulkan kecurangan yang tidak terduga. Hal ini bisa dilihat melalui Survey Fraud Indonesia tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa lembaga yang paling banyak dirugikan karena fraud adalah lembaga pemerintahan sebesar 48,5%. Hal ini terjadi karena sebagian besar kasus

fraud yang diungkap oleh media di Indonesia adalah kasus-kasus fraud di pemerintahan. Data juga menjelaskan bahwa laporan menjadi media terbesar terungkapnya fraud, laporan tersebut mayoritas berasal dari karyawan institusi itu sendiri dengan persentase 50,2%.

Berdasarkan penjelasan fenomena tersebut, terdapat berbagai macam masalah kecurangan khususnya yang terkait dengan korupsi di lingkungan pemerintahan. Hal ini akan berpengaruh terhadap berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang akan berdampak pada tujuan pemerintah untuk menciptakan clean and good governance terhambat. Korupsi sebagai salah satu permasalahan public yang menjadi perhatian besar harus diminimalkan. Implementasi sistem *whistleblowing* dan partisipasi pegawai dalam melaporkan fraud menjadi kebutuhan serta penguatan sistem hukum yang terkait dengan whistleblower harus diperjelas.

Banyaknya kasus kecurangan yang melibatkan peran dari pegawai pemerintah, memungkinkan untuk dilakukannya penelitian dengan responden pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sijunjung. Menjadi seorang whistleblower dari kalangan PNS dinilai cukup berat. Pada instansi pemerintah, pegawai negeri sipil sebagai karyawan, merupakan pengguna potensial dari sistem *whistleblowing* karena pegawai secara aktif terlibat dalam kegiatan operasional dan teknis dari pemerintah (Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2005). PNS memiliki pengetahuan rinci tentang

bagaimana organisasi di pemerintah bekerja, maka merekalah yang paling mungkin untuk mengetahui tentang keberadaan korupsi di lingkungan kerjanya.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam meminimalisir hal tersebut telah membentuk tim penerima pengaduan tindak pidana korupsi sebagai salah satu solusi yang efektif agar kecurangan-kecurangan yang terjadi dapat dideteksi sedini mungkin. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi / *Whistleblowing* System di Lingkungan Pemerintah Daerah. Penerapan *whistleblowing* pada instansi pemerintah juga menjadi salah satu indikator penguatan pengawasan yang dilakukan. Sasaran yang ingin dicapai dari pengawasan tersebut adalah meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah. Dengan adanya *whistleblowing* system pada Kabupaten Sijunjung diharapkan bisa memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan public, secara mudah dan aman untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran yang terjadi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung

Menurut Dela dan Frinaldi (2023) Pengimplementasian *whistleblowing* system di Kabupaten Sijunjung dapat dikatakan efektif. Akan tetapi, ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak ditemukan kasus-kasus kecurangan yang terjadi belum terdeteksi dari dini di Kabupaten Sijunjung. Hal ini menunjukkan bahwa belum tercapainya sasaran yang dimaksudkan. Penelitian juga dilakukan untuk

memberikan pemahaman lebih terkait faktor-faktor yang terkait dengan niat pegawai dalam melakukan *whistleblowing* dan juga melaporkan adanya tindakan kecurangan merupakan hal yang harus dilakukan bagi setiap pegawai dalam meminimalisir kerugian yang dialami oleh instansi.

Berbagai upaya dilakukan dalam mengungkapkan pelaku tindak kecurangan, salah satunya yang paling efektif dengan meningkatkan peran whistleblower. Akan tetapi, birokrasi yang rumit berpotensi menjadi kendala yang cukup besar untuk menemukan dan mengungkapkan kecurangan yang dilakukan oknum pegawai pemerintahan (Sonhadji, 2022). Tindakan pelaporan kecurangan biasanya terjadi karena adanya keinginan dari terlapor untuk melindungi organisasinya. Sebagian orang memandang bahwa whistleblower sebagai pelindung heroik terhadap nilai-nilai yang dianggapnya lebih penting daripada loyalitas terhadap organisasi (Bagustianto & Nurkholis, 2015).

Whistleblower berperan besar pada pengungkapan praktik korupsi pada lembaga-lembaga publik, pemerintahan dan perusahaan swasta. Jika perlindungan terhadap whistleblower tidak ada maka mengakibatkan rendahnya partisipasi publik dalam membongkar suatu dugaan Tindakan pelanggaran (Semendawai et al., 2011). Oleh karena itu peran dari whistleblower perlu terus didorong diterapkan dan disosialisasikan baik itu pada lembaga pemerintah dan institusi public lainnya. Organisasi bisa berperan aktif membantu memfasilitasi pengungkapan kecurangan yang terjadi melalui pembinaan lingkungan dengan cara menyelaraskan norma-

norma organisasi, praktik dan sistem penghargaan dengan perilaku etis (Azharuddin & Asnawi, 2017). Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Machiavellian dan Religiusitas terhadap Niat Melakukan Whistleblowing**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah pengaruh *machiavellian* terhadap niat melakukan *whistleblowing*?
2. Apakah pengaruh *religiusitas* terhadap niat melakukan *whistleblowing*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis menjabarkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh *machiavellian* terhadap niat melakukan *whistleblowing*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *religiusitas* terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, dapat diketahui manfaat penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagi penulis, penelitian ini mampu memberikan wawasan dan pengetahuan lebih kepada para peneliti dan menjadi sumber referensi baru untuk melakukan penelitian selanjutnya. Terutama terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pegawai dalam melakukan Tindakan *whistleblowing*.
2. Bagi instansi pemerintah, hasil dari penelitian diharapkan memberikan masukan serta pertimbangan dalam membuat kebijakan ketika menerapkan *whistleblowing* pada pemerintahan. Dengan mengetahui hal-hal yang dapat mempengaruhi pegawai menjadi whistleblower, maka hal ini akan memudahkan instansi pemerintah menetapkan regulasi yang tepat dalam membuat kebijakan.
3. Bagi akademisi, penelitian ini bisa memperbanyak literatur dan ilmu pengetahuan maupun wawasan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat *Whistleblowing* seseorang